

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM *INDONESIA CARBON*
EXCHANGE DALAM PRAKTIK
PERDAGANGAN KARBON PADA
MANIFESTASI *GREEN ECONOMY* DI
INDONESIA**



Oleh

**MUHAMMAD MAULANA MALIK
NIM. 2220215310011**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**KEPASTIAN HUKUM *INDONESIA CARBON EXCHANGE*
DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN KARBON PADA
MANIFESTASI *GREEN ECONOMY* DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh
**MUHAMMAD MAULANA MALIK
NIM. 2220215310011**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : Kepastian Hukum Indonesia Carbon Exchange Dalam Praktik
Perdagangan Karbon Pada Manifestasi Green Economy Di
Indonesia
Nama : Muhammad Maulana Malik
NIM : 2220215310011

Disetujui,
Komisi Pembimbing


Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



H. Ahmad Syaufi
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



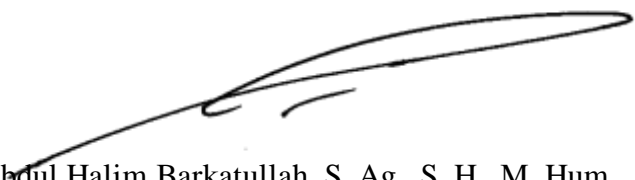
Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DI SETUJUI
PADA TANGGAL.....

Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Hukum



H. Ahmad Syaufi
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis ini telah dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 23 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S. H., M. H.

Sekretaris : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S. H., M. Hum.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. Hum.

الحق بلا نظام قد يغلبه الباطل بنظام

*Sebuah kebenaran yang tidak berdisiplin (terorganisasi),
dapat dikalahkan dengan kebatilan yang sistematis.*

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ❧ فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

*Sesungguhnya kejayaan suatu umat (bangsa) terletak pada akhlaknya selagi
mereka berakhlak dan berbudi perangai utama, jika pada mereka telah hilang
akhlaknya, maka jatuhlah umat (bangsa) itu.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Maulana Malik

NIM : 2220215310011

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikira saya sendiri
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Banjarmasin, Juli 2024



buat pernyataan

id Maulana Malik

2220215310011

MALIK, MUHAMMAD MAULANA. 2024. “KEPASTIAN HUKUM INDONESIA CARBON EXCHANGE DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN KARBON PADA MANIFESTASI GREEN ECONOMY DI INDONESIA”. Program Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. Hum. 108 Halaman.

RINGKASAN

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak akibat adanya perubahan iklim. Dengan wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir Pantai, kenaikannya permukaan laut telah menyebabkan beberapa pulau kecil Indonesia tenggelam, rusaknya ekosistem pesisir pantai, terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir pantai, sampai dengan rusaknya infrastruktur yang menunjang terhubungnya masyarakat antar pulau. Di sisi lain, perubahan iklim juga telah menyebabkan kemarau panjang dan gagal panen bagi para petani sehingga mengganggu stabilitas pangan dalam negeri. Sebagai salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar pada tahun 2021, *Emission Database for Global Atmospheric Research* (EDGAR) mencatat bahwa Indonesia menduduki 10 (sepuluh) besar dan bahkan GRK di Indonesia diproyeksi terus meningkat pada 2021-2030. Berdasarkan laporan dari *JRC Science for Policy Report* pada tahun 2023 di atas, EDGAR mencatat pada 2022 GRK Indonesia pada sektor industri, pembangunan, transportasi, bahan bakar, pertanian dan sampah telah mencapai pada angka 1.240.833 Mt CO₂eq (metrik ton karbon dioksida ekuivalen) dan akan kemungkinan bertambah jika tidak ada upaya dalam pengurangan GRK. Peluncuran IDXCarbon dan regulasinya sebagai upaya negara dalam mengontrol pengurangan GRK dan pemanasan global, tentu tidak terlepas dari bagaimana jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan yang terkandung di dalamnya. Serta, konsekuensi bagaimanakah di masa yang akan datang terhadap perekonomian khususnya pada manifestasi *green economy*.

Dengan dasar hukum yang ada, jika mendasarkan dengan salah dua dari penkategorian lapisan konsep kepastian hukum Bydlinski yaitu Kejelasan Hukum (*legal clarity/Rechtsklarheit*) dan Aksesibilitas Hukum (*legal accessibility/Rechtszuganglichkeit*), kehadiran IDXCarbon dan regulasi yang berkaitan dengannya, secara umum memberikan jawaban akan kejelasan hukum melalui aturan-aturan yang ada dan memberikan aksesibilitas pada para pihak yang melakukan perdagangan melalui hak dan kewajibannya. Namun, jika ditelaah dari tata penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui IDXCarbon, di mana kewajiban utama Penyelenggara Bursa Karbon terletak pada penyelenggaraan perdagangan unit

karbon yang wajib dilaksanakan dengan teratur, wajar dan efisien. Tiga pilar ini juga diperkuat dengan kewajiban pengadaan jasa hingga pengikatan, pertemuan dan penyelesaian antar pihak yang bertransaksi. Adapun hak yang melekat pada para pihak dapat dilihat pada cakupan penyediaan sistem perdagangan. Dalam mekanismenya, pertemuan pihak yang menjual dan membeli unit karbon mendapatkan hak untuk saling mengajukan dan menawarkan harga dari unit karbon yang akan dijual hingga sampai ke tahap penyelesaian transaksi. Perihal ini, penulis menemukan kekaburan secara norma (*vague norm*) dalam penetapan harga. Pada salah satu pengkategorian hukum Bydlinski yaitu keajekan hukum (*legal stability/Rechtsstabilitat*), di mana hukum dengan norma-normanya menjadi stabilisator. Jika dikaji dari beberapa peraturan yang ada, tidak satupun dari tiap lapisan peraturan menjelaskan mengenai harga efek atau sertifikat yang diperjualbelikan baik secara nominal maupun harga pembuka atau penutup. Fluktuasi harga yang tercipta dari bagaimana *supply and demand* berlaku, menjadi sebuah isu yang nyata dari adanya kekaburan ini. Hal yang dicemaskan adalah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dengan framing jual beli karbon sebagai media tawar mewanarnya, namun dalam pelaksanaannya terdapat aksi terselubung terhadap produksi emisi GRK dengan jumlah yang lebih masif.

Hadirnya bursa karbon sebagai sebuah platform pendukung untuk tercapainya *National Determined Contribution* dalam pengurangan emisi GRK sesuai dengan regulasi yang ada sampai saat ini, dapat dinilai sebagai sebuah langkah penting untuk menyiapkan langkah-langkah pengembangan lainnya pada penyelenggaraan bursa karbon secara umum dan kemanfaatannya pada *green economy* secara khusus. Salah satu langkah pengembangan yang kiranya nanti perlu untuk keberlangsungan *green economy* dan untuk tercapainya *Net Zero Emission* serta dapat membantu mengurangi emisi karbon di masa yang akan datang dan mendorong para pelaku ekonomi untuk beralih pada penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

MALIK, MUHAMMAD MAULANA. 2024. “INDONESIAN CARBON EXCHANGE LEGAL CERTAINTY IN CARBON TRADING PRACTICES ON THE MANIFESTATION OF THE GREEN ECONOMY IN INDONESIA”. Master of Law Program, Postgraduate, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. Hum. 108 Pages.

ABSTRACT

This research aims to assess the extent to which regulations related to IDXCarbon have impacts and benefits on the manifestation of a green economy in Indonesia. Using normative legal methods which is descriptive and utilize statutory and conceptual approaches, researchers look for and collect laws and regulations relating to Carbon Trading in the manifestation of a green economy. The binding force of international Agreements makes made Indonesia consider it necessary to immediately follow up the program on the Nationally Determined Contribution by presenting a carbon trading scheme. Through POJK Number 14 of 2023, IDXCarbon with its three pillars of implementation (measured, reasonable and efficient) provides a basic explanation of the rules related to the implementation of carbon trading practices and also provides accessibility to trading parties through their rights and obligations. The significance of carbon trading practices towards the realization of a green economy in several countries with low carbon footprint status is an important barometer for other countries, especially Indonesia. As an inseparable part of the green economy, the actualization of carbon trading practices through IDXCarbon will have an effect on sustainable development. The same thing will also have a positive impact on the effectiveness of the energy sector by implementing NDC and realizing Net Zero Emissions and starting to shift to new renewable energy which will provide benefits to realize the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding providing a decent life for all citizens.

Keywords: Carbon Trading, Green Economy, Sustainable Development

MALIK, MUHAMMAD MAULANA. 2024. “KEPASTIAN HUKUM INDONESIA CARBON EXCHANGE DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN KARBON PADA MANIFESTASI GREEN ECONOMY DI INDONESIA”. Program Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. Hum.** 108 Halaman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengaturan terkait praktik perdagangan karbon dalam Indonesia Carbon Exchange memberi dampak serta manfaat pada manifestasi green economy di Indonesia. Dengan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, peneliti mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perdagangan Karbon pada manifestasi green economy dan mengikuti setelahnya penguatan teori dari buku-buku atau literatur hukum diikuti dengan alat pengumpul data studi lain berupa dokumen. Kekuatan mengikat pada Kyoto Protocol dan Paris Agreement membuat Indonesia memandang perlu dengan segera untuk menindaklanjuti program Nationally Determined Contribution dengan menghadirkan skema perdagangan karbon. Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023, IDXCarbon dengan tiga pilar pelaksanaannya (teratur, wajar dan efisien) menyampaikan penjelasan dasar mengenai aturan-aturan terkait pelaksanaan praktik perdagangan karbon dan juga memberikan aksesibilitas pada para pihak yang melakukan perdagangan melalui hak dan kewajibannya. Signifikansi praktik perdagangan karbon terhadap realisasi green economy pada beberapa negara dengan status low carbon footprint menjadi barometer penting bagi negara lainnya khususnya Indonesia. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari green economy, aktualisasi praktik perdagangan karbon melalui IDXCarbon akan memberikan efek pada pembangunan berkelanjutan. Hal serupa juga akan berdampak pada efektifitas yang positif terhadap sektor energi dengan melaksanakan NDC serta mewujudkan Net Zero Emission dan mulai bergeser kepada energi baru terbarukan akan memberikan manfaat untuk mewujudkan Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perihal memberikan kehidupan yang layak pada seluruh warga negara.

Kata Kunci: Perdagangan Karbon, *Green Economy*, Pembangunan Berkelanjutan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya, Tuhan semesta alam, Pemilik hari kiamat. Doa dan sholawat serta salam tercurah kepada nabi terakhir Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Alhamdulillah, perjalanan dalam mengenyam pendidikan ini tiba pada ujung cerita dengan selesainya penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidaklah luput dari berbagai kekurangan, baik dari substansi, tata bahasa, maupun dari teknis penulisan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan kekhilafan dari penulis.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis tentu tidak luput dari berbagai uluran tangan berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Bapak Achmad Faishal, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak H. Ahmad Syaufi, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. Hum., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan serta petunjuk selama proses penulisan tesis ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mentransferkan ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir selama perkuliahan;
5. Bapak/Ibu staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga besar yang telah mendukung baik secara dzohir dan batin demi kelancaran penulisan tesis ini;
7. Istri tercinta, yang menjadi saksi dalam perjalanan terjal ini, terima kasih atas doa dan dukungan yang tak terhingga dan tak ternilai dalam penulisan tesis ini;

8. Sahabat-sahabat Masyarakat Bagahia, Anak Remahan, El-Janooby FC, dan IKPM Kal-Sel;
9. Rekan-rekan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Angkatan 2022.

Semoga atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banjarmasin, Juli 2024

Muhammad Maulana Malik

NIM. 2220215310011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iii
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	28
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	33
BAB II KEPASTIAN HUKUM <i>INDONESIA CARBON EXCHANGE</i> DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN KARBON DAN PEREKONOMIAN	
A. Kerangka Hukum Perjanjian Internasional Sebagai Dasar Transaksi Dalam Praktik Perdagangan Karbon	34

B. Kepastian Hukum <i>Indonesia Carbon Exchange</i> Dalam Penjaminan Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Bertransaksi	53
---	----

BAB III KEMANFAATAN REGULASI PRAKTIK PERDAGANGAN KARBON PADA MANIFESTASI GREEN ECONOMY DI INDONESIA

A. Pengaruh Penerapan Regulasi Praktik Perdagangan Karbon Pada Perekonomian Negara <i>Low Carbon Footprint</i>	76
B. Manfaat Praktik Perdagangan Karbon Pada Manifestasi <i>Green Economy</i> di Indonesia	97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

	Halaman
Gambar 1.1 Emisi Gas Rumah Kaca lintas sektor di Indonesia 2022.....	5
Gambar 2.1 Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon dalam Perpres NEK Nomor 98 Tahun 2021	59